

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia pada dasarnya memiliki hasrat maupun keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, baik kebutuhan untuk mendapatkan sandang, papan, pangan yang cukup sampai pada kebutuhan untuk membeli barang-barang mewah. Terdapat banyak sekali kategorisasi yang dilakukan oleh para ahli terdahulu sehubungan dengan kebutuhan manusia.

Batik merupakan salah satu simbol pakaian khas di wilayah nusantara yang sudah diwariskan secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang silam. Di samping keindahan bentuk dan coraknya, batik menyimpan nilai filosofi yang tinggi karena motifnya melambangkan kehidupan dan kondisi alam.. Di kalangan para leluhur, membatik merupakan kegiatan yang dapat dilakukan sehari-hari bahkan untuk kalangan tertentu, misalnya keraton. Kain batik dengan motif tertentu menjadi sebuah pakaian kebesaran (Destin Huru Setiati, 2007 : 1).

Umumnya dalam suatu wilayah atau negara tertentu di mana terdapat pemerintah atau pihak – pihak tertentu yang memiliki otorisasi, akan terdapat pungutan ataupun ‘iuran’ atas hasil aktivitas ekonomi yang terjadi. Pungutan tersebut dapat disebut juga dengan pajak. Menurut PJA Andriani (2013), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutang oleh mereka yang berkewajiban untuk membayar sesuai dengan peraturan tanpa pencapaian, yang dapat langsung ditunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik terkait dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan.

Perihal pajak yang akrab dengan kebutuhan akan kemewahan, khususnya di Indonesia, ialah yang disebut dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana landasan hukumnya juga telah tertuang dalam Undang Undang No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak tersebut secara garis besar telah banyak mengakomodasi kegiatan jual beli yang sejalan dengan aktivitas akan kemewahan, baik yang dilakukan oleh pengusaha perorangan maupun oleh suatu korporasi tertentu.

Adapun dalam menentukan objek PPnBM di Indonesia, pemerintah selaku pengambil kebijakan kerap mengedepankan aspek fleksibilitas dengan mengikuti

perkembangan zaman. Barang yang dianggap mewah di waktu yang lampau belum tentu termasuk barang mewah lagi pada saat ini. Sebagai contoh dahulu televisi dan kulkas tergolong barang mewah dan hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Kedua barang tersebut tentunya sangat jarang dijumpai di tempat umum. Bahkan untuk menonton televisi saja pada masa itu, bisa jadi masyarakat harus rela berjalan jauh untuk menumpang menonton di tempat orang yang lebih berada. Kini, Pesawat televisi bukan barang mewah lagi, tapi sudah merupakan kebutuhan setiap orang dalam keluarga, baik di perkotaan maupun di pedesaan (Marfuah Sri S, 2007).

Tentunya hal yang sama dapat berlaku sebaliknya manakala ditemukan barang baru dalam inovasi industri yang dilakukan serta memenuhi definisi klasifikasi barang mewah sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah disebutkan bahwa terdapat penambahan objek PPnBM baru seperti mobil mewah dengan kapasitas isi silinder yang berbeda-beda.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengambil tema terkait dengan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Penulis memilih judul **“ANALISIS FISIBILITAS PAKAIAN PREMIUM SEBAGAI OBJEK PPnBM (STUDI KASUS BATIK PREMIUM PRODUKSI USAHA GARUDA KENCANA BATIK)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian menjadi “Apakah batik premium produksi usaha Garuda Kencana Batik bisa menjadi objek PPnBM?”

Untuk melihat fisibilitas, maka penulis akan melihat dari perspektif berdasarkan ketentuan UU PPnBM pasal 5, yaitu :

1. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok
2. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
3. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
4. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini menurut penulis dapat disebutkan menjadi “Mengetahui apakah batik premium produksi usaha Garuda Kencana Batik bisa menjadi objek PPnBM” yang ditinjau dari perspektif kemewahan berdasarkan ketentuan UU PPnBM Pasal 5 sebagaimana telah dijabarkan pada bagian rumusan masalah.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan pada penelitian ini pada dasarnya ialah berfungsi sebagai pemisah ataupun sekat antara hal-hal yang akan dibahas serta yang tidak akan dibahas. Penulis akan membatasi aspek-aspek berkaitan dengan dimensi yang diangkat dalam penelitian, dengan tujuan agar tidak melebar ke luar jalur permasalahan. Batasan dalam ruang lingkup penulisan juga dapat ditujukan untuk meminimalisir kesalahan persepsi maupun interpretasi.

Adapun batasan ruang lingkup yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu meliputi pembahasan mengenai persepektif kemewahan batik tulis premium dan elemen kemewahannya, khususnya pada usaha Garuda Kencana Batik, serta kaitannya dengan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Serangkaian ruang lingkup di atas dipilih karena dianggap akan memberikan proses dan hasil penelitian yang linear (satu arah), sekaligus mereduksi bias pembaca.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan. Manfaat tersebut, antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis dan Akademis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah dan memberikan wawasan bagi pembaca mengenai tinjauan batik tulis premium dalam perspektif kemewahan beserta relevansinya dengan PPnBM. Penulis juga berharap Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan di lingkungan pendidikan tinggi.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis, penelitian dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini merupakan sarana yang tepat dan bermanfaat bagi penulis dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan, yaitu PPnBM.
2. Bagi Masyarakat, penelitian dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan perhatian masyarakat sebagai pembaca sekaligus wajib pajak terhadap bidang perpajakan Indonesia serta terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan perpajakan.
3. Bagi Pemerintah, penelitian dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber saran dan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam membuat suatu kebijakan perpajakan yang memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas dan menyeluruh.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah metode studi kepustakaan yang juga disandingkan dengan metode studi lapangan. Metode studi kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara teoritis sebagai dasar dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir. Adapun metode studi lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan langsung ke lokasi yang dituju untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir. Jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang dapat berupa data ataupun arsip berupa hasil wawancara, dokumentasi foto dan video serta data- data lain yang diperlukan. Data-data tersebut bisa diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap pemilik usaha Garuda Kencana Batik.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisikan Pendahuluan yang merupakan gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir. Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang yang menjelaskan masalah yang diambil, menyertakan alasan mengapa melakukan penelitian, menguraikan rumusan masalah, serta menjabarkan tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Selain itu, bab ini juga

terdiri dari ruang lingkup penulisan dan juga manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori serta penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam karya tulis ini serta menjadi landasan untuk membahas teori yang diangkat.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan data dan fakta serta pembahasan dari topik yang diangkat dengan menerapkan prinsip-prinsip dari teori yang telah dibahas serta membandingkan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku maupun aspek yang dibahas.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan hasil analisis dari pembahasan yang dilakukan penulis dalam BAB III